

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

TUTI ROHAYANI

1010111049

**PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA
(PKV)**

Pembimbing I : Apriwal Gusti, S.H

Pembimbing II: Iwan Kurniawan, S.H.,M.H

**KAJIAN YURIDIS TENTANG EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI INDONESIA
(Tuti Rohayani, BP: 1010111049 Fakultas Hukum Universitas Andalas,
55+VI Halaman , 2017)**

Dosen pembimbing: Apriwal Gusti, S.H dan Iwan Kurniawan, S.H.,M.H

ABSTRAK

Pada tataran implementasi, proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belumlah efektif. Selain mengeluarkan putusan yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera, situasi pemberantasan korupsi Indonesia semakin diperparah dengan timbulnya asumsi bahwa putusan tersebut dijatuhkan disertai dengan adanya indikasi KKN oleh aparat penegak hukum (*Judicial Corruption*). Karena itulah berkembang suatu bentuk pengawasan yang dikenal dengan Eksaminasi. Namun, karena belum adanya aturan hukum yang mengatur secara pasti, selain SEMA No. 1 Tahun 1967, maka akibat hukum dari hasil eksaminasi (dalam bentuk rekomendasi) juga menjadi tidak jelas. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: Bentuk-bentuk eksaminasi terhadap putusan pengadilan, Dasar pertimbangan hukum pelaksanaan eksaminasi terhadap putusan pengadilan, Kedudukan eksaminasi dalam penegakan hukum pidana korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*. Dengan metode ini akan dapat dideskripsikan, Bentuk eksaminasi terhadap putusan pengadilan: Eksaminasi umum, Eksaminasi khusus, Eksaminasi terbuka, dan Eksaminasi tertutup. Dasar Pertimbangan Hukum Pelaksanaan Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan adalah SEMA No. 1 Tahun 1967, Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Kedudukan Eksaminasi Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Indonesia adalah secara tidak langsung eksaminasi juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum pidana korupsi. Karena indikasi praktik mafia peradilan akan menjadi salah satu atau syarat dilakukannya eksaminasi.

THE JURIDIS STUDY ON EXCLUSION OF THE COURT CURRENCY IN INDONESIA'S CRIMINAL LAW ENFORCEMENT

(Tuti Rohayani, BP: 1010111049 Faculty of Law University of Andalas,

55 + VI Pages, 2017)

Supervisor: Apriwal Gusti, S.H and Iwan Kurniawan, S.H., M.H

ABSTRACT

At the implementation level, the law enforcement process of corruption eradication in Indonesia has not been effective. In addition to issuing light judgments and no deterrent effect, Indonesia's corruption eradication situation is further exacerbated by the assumption that the verdict is imposed with an indication of corruption by law enforcement officials (Judicial Corruption). That's why there is developed a form of supervision known as Eksaminasi. However, due to the absence of definite rule of law, other than SEMA No. 1 Year 1967, then the legal consequences of the results of the examination (in the form of recommendations) also become unclear. As for the formulation of the problem in writing this thesis are: Forms of examination of the judgment of the court, Basic legal considerations of the implementation of examination of court decisions, the position of examination in criminal law enforcement corruption. The method that writer use in this research is normative juridical method. With this method will be described, Forms of Examination of Court Decisions: General Examination, Special Examination, Open Examination, and Closed Examination. Basic Legal Consideration of Examination of Court Judgment is SEMA No. 1 of 1967, Article 42 of the Law of the Republic of Indonesia Number 48 Year 2009 on Judicial Power, and the Law of the Republic of Indonesia Number 49 Year 2009 on General Courts. The position of Examination in the Enforcement of Corruption Law of Indonesia is indirectly examination also affects the process of criminal law enforcement of corruption. Because the indication of judicial mafia practice will be one or one condition for the examination.